

Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dalam Mencapai Target Nasional

The Influence of Regional Fiscal Capacity on the Performance of the Civil Registration and Population Service of Maluku Province in Achieving National Targets

Arief Rahman*, Mohamad Arsad Rahawarin, Hendry Selanno

Universitas Pattimura, Indonesia

* ariefrahman12@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This study analyzes the influence of regional fiscal capacity on the performance of the Civil Registration and Population Service (Disdukcapil) of Maluku Province in achieving national administrative targets. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through interviews, document reviews, and field observations. The results show that fiscal capacity significantly supports operational activities, service infrastructure, and outreach programs, particularly for remote island communities. Nevertheless, fiscal capacity alone does not determine performance outcomes. Leadership, coordination, and service innovation also play crucial roles. Despite fiscal limitations, Disdukcapil has adopted adaptive strategies to sustain service delivery, though disparities in access persist. Strengthening fiscal policy, optimizing transfer funds, and improving governance capacity are essential for sustainable and equitable population services. This study contributes to the understanding of fiscal dynamics and public service performance in geographically dispersed regions.

Keywords

Fiscal Capacity,
Population
Administration, Public
Service Performance

Article History

Received: 2025-11-09
Accepted: 2025-11-13

Copyright © 2025, Rahman et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i3.224](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.224)

1. PENDAHULUAN

Kapasitas fiskal daerah merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi dasar, seperti penerbitan KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya, Disdukcapil memerlukan dukungan fiskal yang memadai untuk menjalankan programnya secara optimal. Di daerah-daerah seperti Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan,

ketercukupan dana menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan layanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kapasitas fiskal yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel dan strategis kepada sektor-sektor prioritas, termasuk urusan kependudukan. Dengan tersedianya dana yang cukup, Disdukcapil dapat menyelenggarakan program layanan keliling ke daerah terpencil, merekrut tenaga operator tambahan, serta memperbaiki peralatan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam proses perekaman dan pencetakan dokumen. Ketersediaan anggaran juga memungkinkan dinas untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi aparatur pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi pelayanan dengan masyarakat.

Sebaliknya, keterbatasan kapasitas fiskal akan menyebabkan Disdukcapil mengalami kendala dalam operasional harian, mulai dari kekurangan SDM hingga ketidakmampuan menjangkau wilayah-wilayah dengan hambatan geografis. Ketergantungan pada dana transfer pusat yang tidak fleksibel sering kali menghambat pelaksanaan inovasi lokal. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya capaian target nasional, seperti keterlambatan perekaman e-KTP atau minimnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak di wilayah terluar. Dengan kata lain, kapasitas fiskal yang rendah dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat, terbatas, dan tidak merata.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah pusat telah menetapkan berbagai target dan indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan. Namun, pencapaian target tersebut sangat tergantung pada kondisi fiskal masing-masing daerah. Oleh karena itu, kapasitas fiskal tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana daerah mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pelayanan kepada warganya. Dengan meningkatkan kapasitas fiskal, maka daerah dapat mengambil inisiatif-inisiatif strategis yang lebih independen dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Provinsi Maluku sebagai wilayah yang terdiri dari banyak pulau dan terbagi dalam berbagai karakter sosial dan ekonomi, menghadapi tantangan unik dalam layanan administrasi kependudukan. Perbedaan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota berdampak pada ketimpangan kualitas layanan Disdukcapil. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi lebih mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung hanya menjalankan program dasar tanpa inovasi. Maka, peningkatan kapasitas fiskal harus menjadi prioritas strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung lembaga teknis seperti Disdukcapil.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan geografis yang memengaruhi pencapaian target layanan administrasi kependudukan secara merata. Meskipun cakupan perekaman e-KTP di Maluku telah mencapai sekitar 89% pada tahun 2024 dan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun meningkat menjadi 83%, disparitas antar kabupaten/kota masih tinggi. Kota Ambon dan Maluku Tengah mencatat cakupan di atas 90%, sementara Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru masih di bawah 75%, menunjukkan ketimpangan pelayanan yang signifikan di wilayah kepulauan dan terpencil. Kurangnya dukungan anggaran daerah, keterbatasan sarana prasarana digital, serta minimnya tenaga operator terlatih turut memperlambat proses administrasi dan menurunkan kepuasan masyarakat. Selain itu, belum optimalnya integrasi data dan inovasi layanan digital menyebabkan kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, masih kesulitan mengakses layanan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah

dan tata kelola pelayanan publik yang adaptif agar kinerja Disdukcapil dapat mendukung pencapaian target nasional secara inklusif di seluruh wilayah Maluku.

Meskipun berbagai studi telah membahas pentingnya kapasitas fiskal dalam mendukung kinerja pelayanan publik secara umum, masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik menyoroti hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), terutama dalam konteks daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku. Sebagian besar kajian terdahulu hanya menekankan aspek teknis pelayanan administrasi kependudukan atau evaluasi capaian program nasional tanpa mengaitkannya dengan kondisi fiskal dan kemampuan pendanaan daerah secara komprehensif. Padahal, dalam implementasinya, kualitas layanan Disdukcapil sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, distribusi sumber daya, serta dukungan kebijakan fiskal lokal yang responsif terhadap tantangan geografis dan sosial yang unik di wilayah tersebut.

Selain itu, belum banyak riset yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam bagaimana aktor-aktor di level daerah (seperti pejabat keuangan, aparat Disdukcapil, dan masyarakat pengguna layanan) memaknai keterkaitan antara kapasitas fiskal dan kinerja pelayanan kependudukan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan realitas empirik dan konteks lokal yang sering kali tidak terakomodasi dalam analisis kuantitatif semata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan masukan konkret bagi perumusan kebijakan fiskal dan strategi peningkatan pelayanan kependudukan yang lebih adil dan efektif di wilayah Provinsi Maluku. Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana dan melalui mekanisme apa kapasitas fiskal memengaruhi kinerja Disdukcapil Maluku; faktor non-fiskal apa yang memoderasi hubungan tersebut; serta strategi adaptif apa yang paling efektif diterapkan dalam konteks wilayah kepulauan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dalam mencapai target nasional. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada Disdukcapil Provinsi Maluku dengan alasan ketersediaan data serta relevansi kondisi empiris. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Agustus hingga Oktober 2025.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dalam pengelolaan fiskal dan pelayanan kependudukan. Selain itu, pemilihan informan juga dilakukan dengan mempertimbangkan posisi strategis dan pengalaman mereka dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan layanan administrasi kependudukan. Informan terdiri dari 20 orang yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, yaitu 5 pejabat Disdukcapil, 4 perwakilan Bappeda, 3 pejabat dari Badan Keuangan Daerah, 3 anggota DPRD komisi terkait, serta 5 masyarakat pengguna layanan dari kabupaten/kota berbeda. Prosedur rekrutmen dilakukan melalui surat permohonan resmi kepada instansi terkait dan wawancara langsung bagi masyarakat penerima layanan. Pengumpulan data dilanjutkan hingga mencapai saturasi, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang relevan.

Pendekatan ini memastikan kedalaman dan kredibilitas data, serta memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap keterkaitan kapasitas fiskal dan kinerja Disdukcapil di Provinsi Maluku. Proses penelitian menjunjung etika penelitian, termasuk anonimitas dan persetujuan informan. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan hasil interaksi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk menggali persepsi mengenai kapasitas fiskal, alokasi anggaran, strategi layanan, serta tantangan pencapaian target nasional. Observasi dilakukan untuk melihat alur pelayanan, sistem antrian, dan dukungan fasilitas bagi kelompok rentan. Dokumentasi mencakup telaah terhadap dokumen APBD Provinsi Maluku tahun 2021–2024, khususnya pada Kode Urusan 2.06 (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Sub-Urusan 2.06.01 (Pelayanan Administrasi Kependudukan) untuk menelusuri alokasi dan realisasi anggaran baik dalam satuan nominal (rupiah) maupun persentase terhadap total belanja urusan pemerintahan wajib. Selain itu, ditelaah pula Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Provinsi Maluku pada periode yang sama untuk melihat konsistensi antara input fiskal dan capaian output kinerja. Dokumen target nasional administrasi kependudukan yang dirujuk berasal dari Kemendagri dan Ditjen Dukcapil tahun 2021–2024, terutama indikator cakupan perekaman e-KTP ($\geq 95\%$) dan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun ($\geq 90\%$). Telaah dokumen ini menjadi dasar triangulasi dengan hasil wawancara untuk memastikan jejak audit yang transparan dan validitas temuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Perbandingan antar informan dan pengujian konsistensi data dilakukan secara berulang sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dipilah dan difokuskan ke dalam kategori seperti kapasitas fiskal, strategi pelayanan, dan kinerja Dukcapil. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara untuk memudahkan interpretasi. Kesimpulan ditarik melalui penelaahan hubungan antar kategori data serta verifikasi berulang terhadap sumber informasi. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: kapasitas fiskal daerah diartikan sebagai kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelayanan publik, sementara kinerja Disdukcapil dipahami sebagai efektivitas layanan administrasi kependudukan dalam mencapai target nasional. Kedua konsep ini menjadi pijakan utama dalam proses analisis dan penafsiran data penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini memaparkan temuan utama penelitian mengenai pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dalam mencapai target nasional administrasi kependudukan. Analisis dilakukan berdasarkan data wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terkait alokasi anggaran, strategi pelayanan, dan capaian indikator nasional seperti kepemilikan e-KTP, akta kelahiran, dan layanan kependudukan lainnya. Hasil temuan menunjukkan bagaimana kapasitas fiskal daerah mempengaruhi kemampuan institusi dalam menyediakan sarana, meningkatkan kualitas layanan, serta menjangkau kelompok

masyarakat yang kurang terlayani. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dan konsep teoritis, serta menyoroti tantangan dan upaya strategis yang dilakukan Disdukcapil. Dengan demikian, bagian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara aspek fiskal dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

3.1. Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Dukungan Anggaran Pelayanan

Kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Maluku masih tergolong moderat, sehingga alokasi anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sangat bergantung pada kebijakan prioritas pemerintah daerah. Dalam wawancara, pejabat keuangan menyatakan bahwa meskipun sektor kependudukan bersifat wajib, ketersediaan anggarannya tetap harus menyesuaikan dinamika pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut strategi perencanaan anggaran yang lebih terarah dan responsif. Dengan demikian, kapasitas fiskal memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja layanan kependudukan.

Data dokumentasi APBD menunjukkan bahwa porsi anggaran untuk Disdukcapil mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Fluktuasi ini berpengaruh pada stabilitas pelayanan, terutama dalam penyediaan sarana pelayanan, pembiayaan operasional, dan mobilisasi kegiatan layanan keliling (jemput bola). Beberapa program pelayanan prioritas terpaksa disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Informan dari Bappeda menyatakan bahwa penentuan anggaran sering dipengaruhi oleh kebijakan strategis yang bersifat kompetitif antar perangkat daerah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa isu fiskal bukan hanya masalah teknis, tetapi juga hasil dari proses politik anggaran.

Dalam wawancara, pejabat Disdukcapil menyampaikan bahwa kendala fiskal berdampak pada keterbatasan penyediaan perangkat teknologi dan dukungan pemeliharaan sistem. Sistem layanan kependudukan berbasis digital membutuhkan pembaruan perangkat dan jaringan stabil, namun penganggaran untuk pemeliharaan sering kali tidak menjadi prioritas. Kondisi ini menyebabkan beberapa kecamatan atau unit layanan menghadapi hambatan teknis seperti keterlambatan akses data. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi fiskal berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan harian.

Kapasitas fiskal juga memengaruhi pengembangan sumber daya manusia pengelola layanan. Pelatihan teknis, workshop peningkatan kapasitas operator, hingga fasilitasi sertifikasi kompetensi memerlukan anggaran yang memadai. Namun dalam beberapa tahun, alokasi untuk pengembangan SDM cenderung terbatas sehingga peningkatan kompetensi dilakukan secara bertahap. Dengan beban kerja yang tinggi, kebutuhan penguatan kapasitas SDM menjadi penting untuk meningkatkan keandalan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan fiskal menentukan kualitas tenaga pelaksana layanan kependudukan.

Pada aspek penyediaan layanan ke masyarakat rentan, kapasitas fiskal memiliki implikasi signifikan. Layanan jemput bola ke daerah terpencil membutuhkan biaya transportasi, konsumsi tim, serta koordinasi lintas instansi. Karena anggaran bersifat terbatas, frekuensi layanan jemput bola tidak dapat dilakukan secara rutin di seluruh wilayah. Hal ini berdampak pada keterlambatan pencapaian target nasional, khususnya di

wilayah kepulauan. Dengan demikian, keterbatasan fiskal dapat memperluas kesenjangan akses layanan kependudukan.

Namun demikian, Disdukcapil Provinsi Maluku berupaya melakukan optimalisasi fiskal dengan menyusun prioritas program yang sejalan dengan target nasional. Salah satunya adalah memberikan prioritas pendanaan pada layanan perekaman e-KTP dan akta kelahiran sebagai indikator kinerja utama. Strategi ini memungkinkan pemanfaatan anggaran dilakukan secara lebih fokus dan efektif. Meski jumlah program dibatasi, kualitas capaian tetap diupayakan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi kebijakan fiskal pada tingkat pelaksana teknis.

3.2. Dinamika Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Konteks Kapasitas Fiskal

Pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan anggaran yang dialokasikan melalui kapasitas fiskal daerah. Ketika alokasi anggaran memadai, layanan publik dapat berjalan lebih efektif, mulai dari penyediaan sarana pelayanan hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Namun, pada kondisi fiskal yang terbatas, pelayanan cenderung mengalami hambatan, terutama dalam hal mobilisasi petugas dan pemerataan pelayanan di wilayah kepulauan.

Salah satu tantangan utama pelayanan Dukcapil di Maluku adalah kondisi geografis kepulauan yang memerlukan biaya tinggi untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil. Pelayanan jemput bola, yang seharusnya menjadi solusi, tidak dapat dilakukan secara konsisten apabila dukungan anggaran tidak cukup. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan layanan antara wilayah yang mudah dijangkau dan wilayah terpencil.

Selain itu, ketersediaan fasilitas penunjang seperti jaringan internet, server, dan alat perekaman e-KTP sangat ditentukan oleh dukungan fiskal daerah maupun transfer pusat. Ketika terjadi keterlambatan pengadaan atau perawatan perangkat, proses pelayanan dapat terganggu. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepuasan masyarakat dan lambatnya pencapaian target nasional.

Sumber daya manusia juga menjadi komponen penting dalam mendukung pelayanan. Pelatihan operator dan peningkatan kompetensi pegawai seringkali memerlukan pembiayaan yang tidak kecil. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas membuat kegiatan peningkatan kapasitas pegawai menjadi tidak berkelanjutan. Akibatnya, kualitas pelayanan tidak dapat meningkat sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Walaupun demikian, terdapat beberapa inovasi pelayanan yang tetap dapat berjalan melalui kolaborasi lintas instansi dan dukungan program nasional, seperti kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk jemput bola layanan akta kelahiran. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan tidak semata bergantung pada faktor fiskal, namun juga kreativitas dan koordinasi antar lembaga.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dinas Dukcapil Maluku juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi meskipun dengan keterbatasan anggaran. Sistem layanan digital berhasil mempercepat proses administrasi di beberapa kabupaten/kota, namun belum merata di seluruh wilayah. Tantangan ini memperkuat pentingnya pemerataan dukungan fiskal antar daerah.

Dinamika pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Maluku menggambarkan hubungan yang kuat antara kapasitas anggaran dan kualitas pelayanan. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, upaya pencapaian target nasional tidak dapat berjalan optimal, terutama dalam konteks wilayah kepulauan yang memerlukan biaya pelayanan lebih besar.

3.3. Implikasi Kapasitas Fiskal terhadap Pencapaian Target Nasional Administrasi Kependudukan

Capaian target nasional administrasi kependudukan, seperti kepemilikan e-KTP, akta kelahiran, dan Kartu Keluarga, sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran pendukung operasional dan pelayanan. Ketika kapasitas fiskal daerah kuat, program dan strategi pencapaian target dapat direncanakan secara efektif, termasuk melalui layanan mobile, integrasi layanan lintas sektor, dan digitalisasi layanan.

Namun, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas cenderung menghadapi hambatan dalam mengejar target tersebut. Keterbatasan anggaran menyebabkan rendahnya intensitas pelayanan lapangan, keterbatasan peralatan teknis, dan kurangnya dukungan biaya operasional. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga masyarakat. Dalam konteks Maluku, geografis kepulauan menjadi faktor yang memperbesar kebutuhan pendanaan pelayanan. Kunjungan pelayanan ke pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil memerlukan transportasi laut, logistik, dan koordinasi yang tidak sederhana. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, pelaksanaan program ini berjalan tidak merata.

Meski demikian, kebijakan pusat melalui dana transfer sektoral memberikan ruang untuk memperkuat pencapaian target nasional. Dukungan ini menjadikan daerah mampu menutup sebagian kekurangan fiskal. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara tepat sasaran. Kolaborasi lintas instansi juga menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Sinergi dengan lembaga layanan dasar lainnya tidak hanya memperkuat pelaksanaan layanan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini mendorong percepatan pencapaian target nasional.

Selain pembiayaan dan koordinasi, komitmen kepemimpinan daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target. Kepemimpinan yang responsif cenderung lebih proaktif dalam mengarahkan kebijakan fiskal ke sektor pelayanan publik prioritas seperti administrasi kependudukan. Kapasitas fiskal daerah memberikan implikasi langsung terhadap keberhasilan Provinsi Maluku dalam mencapai target nasional administrasi kependudukan. Semakin kuat kapasitas fiskal, semakin besar peluang untuk mencapai pelayanan yang merata, cepat, dan berkualitas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dalam upaya mencapai target nasional administrasi kependudukan. Ketersediaan anggaran berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, kemampuan melaksanakan layanan jemput bola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan

inovasi layanan berbasis teknologi. Dalam konteks wilayah kepulauan, kapasitas fiskal yang kuat menjadi faktor penentu dalam memperluas jangkauan pelayanan, terutama kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil yang membutuhkan biaya operasional lebih besar. Namun demikian, kapasitas fiskal perlu dipandang sebagai prasyarat yang bekerja secara sinergis dengan kualitas tata kelola, kepemimpinan, dan inovasi pelayanan, bukan sebagai determinan tunggal dari kinerja Disdukcapil.

Meskipun demikian, pencapaian kinerja pelayanan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas fiskal semata. Penelitian ini menemukan bahwa komitmen kepemimpinan, koordinasi antar instansi, serta kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas juga turut memberikan kontribusi penting. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, optimalisasi dana transfer pusat, dan peningkatan pengelolaan anggaran secara efisien, Dinas Dukcapil Provinsi Maluku memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai target nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola, inovasi kebijakan, dan penguatan kapasitas implementatif di tingkat pelaksana layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja aparatur sipil negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 54-69.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Maluku dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Maluku.
- Amaliah, Y., & Sakir, A. R. (2023). Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja aparatur sipil negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 54-69.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Maluku dalam angka 2023*. BPS Provinsi Maluku.
- Bappenas. (2022). *Laporan evaluasi kapasitas fiskal daerah*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku. (2024). *Laporan kinerja Disdukcapil Provinsi Maluku tahun 2023*. Pemerintah Provinsi Maluku.
- Gaspersz, P. (2024). Poverty linked to government performance: Insights from Maluku Barat Daya and Halmahera Timur, Indonesia. *Populasi*, 32(1), 40-60.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan*. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Informasi kapasitas fiskal daerah tahun anggaran 2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurhadi, M., & Sihombing, R. (2020). Pengaruh kapasitas fiskal terhadap kualitas pelayanan publik di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145-158. <https://doi.org/10.25077/jap.12.2.145-158.2020>
- Ridwan, A., & Rahmawati, D. (2021). Analisis kinerja Disdukcapil dalam pencapaian target nasional administrasi kependudukan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 34-48.

- Sakir, A. R., Yunus, R., & Syamsu, S. (2021). Budaya birokrasi: Kinerja pegawai Samsat Maros dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3), 293–316.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance of inspectorate in supervision of government administration in Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 157–189.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sumtaky, M. (2018). Analysis the influence of regional financial management elements on performance of district/city SKPD and its implications on public services in Province of North Maluku. [Unpublished manuscript].
- Talaohu, R. H., Zacharias, T., & Selanno, H. (2024). Self-concept dimension and locus of control dimension on employee performance. *Jurnal Sosial dan Sains (Sosains)*, 4(6).
- Uang, Y., Warella, Y., Larasati, E., & Suwitri, S. (2020). Accessibility of public services in the islands region (Case study: Office of population and civil registry, West Halmahera Regency). *Ecoforum Journal*, 9(3). Retrieved from <https://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/1869>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.